

PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN INFLASI TERHADAP INVESTASI (PMDN) DI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2001-2025

Grace Irene Margaretta Silitonga¹, Indra Maipita²

gracesilitongaa22@gmail.com¹, imaipita@unimed.ac.id²

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Riset ini dimaksudkan guna mengkaji dampak Upah Minimum Regional (UMR) serta laju inflasi terhadap Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara, baik secara individual maupun bersamaan. Dasar pelaksanaan riset tersebut dilandasi oleh signifikansi kebijakan penggajian yang memadai serta kestabilan kondisi makroekonomi dalam mewujudkan suasana investasi yang mendukung demi memacu perkembangan perekonomian wilayah. Pendekatan riset yang diterapkan ialah kuantitatif dengan menggunakan model regresi linier berganda berbasis data deret waktu (time series) selama periode 2001–2025. Pengujian dugaan penelitian dilaksanakan secara individual melalui uji t serta secara bersamaan melalui uji F. Temuan riset memperlihatkan bahwa secara individual, variabel UMR memberikan dampak positif serta bermakna terhadap PMDN di Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$. Kondisi tersebut selaras dengan Teori Makroekonomi Keynesian serta Teori Upah Efisiensi, yang menjelaskan bahwa kenaikan tingkat upah sanggup meningkatkan kemampuan daya beli penduduk sehingga menjadi daya tarik bagi investasi yang berorientasi pasar (market-seeking investment). Sebaliknya, variabel inflasi secara individual menunjukkan keterkaitan yang berlawanan arah, tetapi memberikan pengaruh negatif yang tidak bermakna terhadap PMDN dengan tingkat signifikansi sebesar $0,6822 > 0,05$. Keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa sepanjang perubahan tingkat harga masih berada dalam ambang batas yang dapat ditoleransi, penanam modal domestik telah memperhitungkan risiko tersebut ke dalam perencanaan usaha berjangka panjang sesuai dengan Teori Ekspektasi Rasional. Secara bersama-sama (uji F), gabungan variabel UMR dan inflasi terbukti memberikan pengaruh yang bermakna terhadap PMDN dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Simpulan dari riset ini menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan UMR yang memadai bukanlah menjadi hambatan, melainkan dorongan yang efektif apabila dipadukan dengan kestabilan harga (inflasi) sehingga mampu membentuk ukuran kelayakan iklim investasi yang menyeluruh. Temuan tersebut memberikan konsekuensi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta para pengambil kebijakan terkait agar menyinergikan kebijakan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan pengendalian kestabilan harga yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) demi mempertahankan sekaligus memaksimalkan daya tarik penanaman modal domestik yang berkesinambungan.

Kata Kunci: Upah Minimum Regional (Umr), Inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn), Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu kawasan yang sangat menjanjikan di Indonesia serta memiliki tingkat perekonomian yang tergolong besar apabila ditinjau berdasarkan perspektif makroekonomi maupun posisi geografis yang strategis. Provinsi ini mempunyai kapasitas ekonomi yang cukup tinggi melalui pengembangan sektor perkebunan dan pertanian yang mampu memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa nasional. Kapasitas tersebut perlu terus dioptimalkan dengan mendorong peningkatan produktivitas serta perluasan lapangan pekerjaan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang sangat menunjang, pemanfaatan sumber daya alam tersebut seyogianya segera direalisasikan secara optimal guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan daerah yang lebih maju.

Dalam pemanfaatan sumber daya tersebut diperlukan pembiayaan yang sangat besar, baik berupa sumber daya manusia yang kompeten maupun kapital dalam bentuk dana. Apabila ditinjau berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Provinsi Sumatera Utara mempunyai peluang yang sangat luas bagi kegiatan investasi karena didukung oleh ketersediaan beragam bahan baku dari berbagai sektor, khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi PMDN menjadi salah satu tolok ukur penting yang menggambarkan tingkat keyakinan investor domestik terhadap prospek perekonomian suatu wilayah yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional (Lailan Safina, 2011).

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan, kegiatan usaha dapat diperluas, serta tercipta peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan wilayah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan tolok ukur utama yang mencerminkan tingkat keyakinan penanam modal domestik terhadap keadaan perekonomian pada suatu daerah. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu sentra pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia senantiasa berupaya mengoptimalkan realisasi penanaman modal untuk menopang pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Perkembangan investasi PMDN di Sumatera Utara ditentukan oleh beragam variabel perekonomian, meliputi besaran upah minimal daerah (UMR/UMP) dan inflasi. UMR merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pendapatan bagi pekerja agar dapat mencukupi keperluan kehidupan yang memadai. Pada aspek berbeda, bagi pelaku usaha dan investor, peningkatan UMR dapat meningkatkan biaya produksi, khususnya pada sektor-sektor yang padat karya. Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan investasi karena investor akan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Namun demikian, peningkatan UMR tidak selalu berdampak negatif terhadap investasi. Peningkatan gaji juga mampu menaikkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya merangsang permintaan terhadap produk dan layanan. Bertambahnya kebutuhan pasar dapat membuka kesempatan bisnis yang semakin luas sehingga memikat ketertarikan penanam modal untuk menginvestasikan dananya. Dengan demikian, hubungan antara UMR dan investasi PMDN dapat bersifat dinamis tergantung pada kondisi ekonomi dan struktur sektor usaha yang berkembang di Sumatera Utara.

Di samping UMR, laju inflasi turut menjadi unsur utama yang memengaruhi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Inflasi menggambarkan peningkatan harga produk dan layanan secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu. Besaran inflasi yang terkendali mencerminkan keadaan perekonomian yang kondusif serta memberikan kepastian kepada penanam modal dalam menyusun perencanaan kegiatan usahanya. Sebaliknya, laju inflasi yang tinggi dan sulit dikendalikan dapat menaikkan biaya operasional, melemahkan kemampuan daya beli masyarakat, sekaligus memperbesar ketidakpastian perekonomian sehingga berpotensi menurunkan ketertarikan investor untuk menginvestasikan modalnya.

Di Provinsi Sumatera Utara, perkembangan inflasi dan UMR memperlihatkan pola yang relatif bertambah sejak tahun demi tahun. UMP Sumatera Utara terus mengalami penyesuaian sebagai upaya menjaga kesejahteraan pekerja, sementara inflasi bergerak secara fluktuatif mengikuti kondisi ekonomi nasional maupun global. Perubahan kedua variabel tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap realisasi investasi PMDN yang masuk ke Sumatera Utara. Investor akan mempertimbangkan tingkat upah tenaga kerja sebagai komponen biaya produksi dan tingkat inflasi sebagai indikator stabilitas ekonomi sebelum mengambil keputusan investasi.

Berdasarkan teori investasi yang dikemukakan oleh Keynes, keputusan investasi dipengaruhi oleh ekspektasi laba yang kelak diraih pada periode berikutnya. Tingkat upah dan inflasi merupakan dua faktor yang dapat memengaruhi besarnya keuntungan tersebut. UMR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan, sedangkan inflasi yang tinggi dapat menurunkan efisiensi usaha dan meningkatkan risiko investasi. Sebaliknya, besaran UMR yang sanggup meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat serta laju inflasi yang terkendali mampu mewujudkan suasana investasi yang mendukung. Gejala tersebut mengindikasikan bahwa investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara bukan semata-mata ditentukan oleh unsur internal perusahaan, melainkan juga dipengaruhi oleh keadaan makroekonomi, seperti UMR dan inflasi. Dengan demikian, perlu dilaksanakan riset mengenai dampak UMR dan inflasi terhadap investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara. Riset tersebut diharapkan sanggup menyajikan bukti empiris mengenai keterkaitan di antara ketiga variabel tersebut sehingga dapat dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan yang mampu mewujudkan suasana investasi yang kondusif serta menunjang pertumbuhan perekonomian daerah secara berkesinambungan.

Gambar 1
Investasi PMDN 2001 - 2025 (Milliar)



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan gambar 1 perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut mencerminkan adanya perubahan kondisi ekonomi, iklim investasi, kebijakan pemerintah, serta tingkat kepercayaan investor domestik terhadap prospek perekonomian daerah.

Pada tahun 2001, realisasi investasi PMDN di Sumatera Utara tercatat sebesar 528.644,94 miliar rupiah dan meningkat menjadi 653.034,22 miliar rupiah pada tahun 2002. Namun, setelah itu investasi mengalami penurunan hingga mencapai 104.602,84 miliar rupiah pada tahun 2004 yang merupakan salah satu nilai terendah selama periode penelitian. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang belum stabil, rendahnya minat investasi domestik, serta terbatasnya dukungan infrastruktur dan iklim usaha pada periode tersebut.

Pada tahun 2005 dan 2006 investasi PMDN kembali meningkat menjadi 621.643,74 miliar rupiah dan 594.245,38 miliar rupiah. Akan tetapi, pada tahun 2007 investasi kembali mengalami penurunan menjadi 167.246,33 miliar rupiah. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwasanya kegiatan penanaman modal dalam negeri tetap amat peka terhadap dinamika situasi perekonomian serta regulasi penanaman modal.

Periode tahun 2010–2016 menunjukkan tren peningkatan investasi yang relatif baik. Nilai investasi meningkat dari 170.305,64 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 495.482,93 miliar rupiah pada tahun 2016. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya aktivitas sektor industri, perdagangan, dan jasa yang menjadi penopang perekonomian Sumatera Utara.

Pada tahun 2017 investasi PMDN kembali mengalami penurunan menjadi 116.836,39 miliar rupiah. Namun pada tahun 2018 terjadi lonjakan investasi yang sangat signifikan

hingga mencapai 837.180,00 miliar rupiah, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat investor domestik dalam menanamkan modalnya di Sumatera Utara, yang kemungkinan didorong oleh proyek-proyek investasi berskala besar, pembangunan infrastruktur strategis, serta membaiknya iklim investasi daerah.

Setelah mencapai puncak pada tahun 2018, investasi PMDN kembali mengalami penurunan menjadi 197.490,00 miliar rupiah pada tahun 2019 dan 181.895,00 miliar rupiah pada tahun 2020. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan perlambatan ekonomi global serta dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan usaha dan investasi mengalami hambatan. Meskipun demikian, investasi mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 hingga 2025. Nilai investasi meningkat dari 184.843,90 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 227.892,27 miliar rupiah pada tahun 2022. Selanjutnya investasi tetap berada pada level yang relatif stabil, yaitu sebesar 221.892,00 miliar rupiah pada tahun 2023, 215.740,00 miliar rupiah pada tahun 2024, dan meningkat kembali menjadi 224.457,00 miliar rupiah pada tahun 2025.

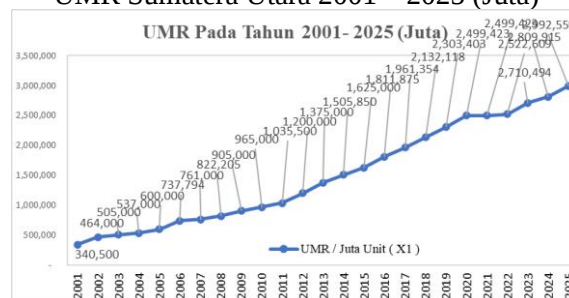
Dalam pembangunan ekonomi daerah, investasi PMDN memiliki peran penting sebagai sumber pembentukan modal yang dapat mengoptimalkan kapabilitas produktivitas, mengembangkan aktivitas bisnis, serta memacu perkembangan perekonomian. Tingginya investasi yang masuk ke suatu daerah umumnya akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan peluang usaha baru. Oleh karena itu, perkembangan investasi PMDN menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar, penanaman modal merupakan unsur pokok yang menentukan perkembangan perekonomian karena investasi sanggup menambah persediaan modal serta kemampuan produksi. Semakin besar dana yang diinvestasikan, maka semakin tinggi pula peluang pertumbuhan perekonomian yang mampu diwujudkan. Oleh karena itu, peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu aspek strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian daerah secara berkesinambungan.

Fluktuasi investasi PMDN di Sumatera Utara menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Dalam penelitian ini, faktor yang diduga memengaruhi investasi PMDN adalah Upah Minimum Regional (UMR) dan tingkat inflasi. UMR yang terus meningkat dapat memengaruhi biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan, sedangkan inflasi mencerminkan tingkat stabilitas ekonomi yang menjadi pertimbangan penting bagi investor. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh UMR dan inflasi terhadap investasi PMDN di Sumatera Utara menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam mendukung peningkatan investasi daerah.

Gambar 2

UMR Sumatera Utara 2001 – 2025 (Juta)



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 2 tersebut dapat diamati bahwa Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2001–2025 memperlihatkan kecenderungan yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berbeda dengan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang relatif mengalami fluktuasi, perkembangan UMR di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan peningkatan yang cukup konsisten sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja serta mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat di tengah dinamika kondisi perekonomian.

Adapun UMR terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp340.500. Rendahnya tingkat upah pada periode tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan pasca krisis ekonomi Asia 1997–1998. Pada masa itu, tingkat produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah, kemampuan perusahaan dalam memberikan upah yang lebih tinggi masih terbatas, serta kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu, tingkat inflasi yang cukup tinggi pada akhir dekade 1990-an menyebabkan pemerintah dan pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pengupahan agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja.

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional dan daerah, UMR Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 UMR telah mencapai Rp965.000 dan meningkat menjadi Rp1.505.850 pada tahun 2014. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat yang mendorong penyesuaian tingkat upah minimum setiap tahunnya.

Peningkatan yang cukup signifikan juga terlihat pada periode 2015–2020. Pada tahun 2015 UMR Sumatera Utara sebesar Rp1.625.000 dan meningkat menjadi Rp2.499.423 pada tahun 2020. Kenaikan tersebut didorong oleh penerapan kebijakan pengupahan nasional yang mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penetapan upah minimum. Selain itu, meningkatnya biaya hidup masyarakat serta tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja turut menjadi faktor yang memengaruhi kenaikan UMR selama periode tersebut.

Meskipun pada tahun 2021 UMR relatif belum menunjukkan pergeseran yang berarti apabila dibandingkan dengan tahun terdahulu, yaitu tetap berada pada kisaran Rp2.499.423, namun pada tahun-tahun di periode-periode selanjutnya kembali menunjukkan kenaikan. UMR Sumatera Utara mencapai Rp2.710.494 pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp2.809.915 pada tahun 2024, dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp2.992.559. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempertahankan keselarasan di antara jaminan tenaga kerja serta keberlanjutan sektor bisnis, khususnya sesudah pemulihan perekonomian setelah pandemi COVID-19.

Dengan demikian, tren kenaikan UMR di Sumatera Utara selama periode 2001–2025 mencerminkan adanya peningkatan standar hidup masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi secara bertahap. UMR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja, tetapi juga menjadi sebuah tolok ukur yang mencerminkan pertumbuhan perekonomian sebuah wilayah.

Gejala peningkatan UMR tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena mempunyai hubungan yang kuat dengan kegiatan investasi. Pada satu sisi, kenaikan UMR mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta kemampuan daya beli masyarakat sehingga merangsang permintaan terhadap produk dan layanan. Keadaan tersebut berpotensi membuka kesempatan pasar yang lebih luas serta memikat ketertarikan investor untuk menginvestasikan modalnya. Akan tetapi, pada sisi lainnya, peningkatan UMR juga mampu menaikkan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan, terutama pada sektor-sektor yang padat tenaga kerja. Apabila kenaikan upah tidak disertai dengan peningkatan

produktivitas tenaga kerja, maka biaya operasional perusahaan akan bertambah dan berpotensi menurunkan minat investasi.

Hal ini sejalan dengan teori pasar tenaga kerja yang menjelaskan bahwa tingkat upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipertimbangkan investor dalam mengambil keputusan investasi. Menurut teori investasi Keynes, keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh di masa mendatang. Peningkatan upah yang terlampau tinggi berpotensi mengurangi tingkat laba perusahaan, sedangkan kenaikan gaji yang disertai oleh peningkatan produktivitas serta kemampuan daya beli masyarakat justru mampu mewujudkan suasana investasi yang lebih mendukung.

Dalam kerangka Provinsi Sumatera Utara, kenaikan UMR yang berlangsung secara berkesinambungan setiap tahun menjadi salah satu unsur yang diperkirakan memengaruhi perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan demikian, perlu dilakukan pengkajian terhadap keterkaitan antara UMR dan investasi PMDN untuk mengetahui apakah peningkatan upah minimum sanggup mendorong atau bahkan menghambat pertumbuhan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara.

Riset yang dilaksanakan oleh Febiani (2024) memperlihatkan bahwa besaran upah minimum memberikan pengaruh terhadap kegiatan perekonomian serta sektor usaha. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan pengupahan merupakan salah satu aspek strategis yang perlu memperoleh perhatian dalam mewujudkan keselarasan antara kesejahteraan tenaga kerja dan pertumbuhan penanaman modal.

Gambar 1.3

Inflasi Sumatera Utara 2001 – 2025 (Persen)



Sumber : Bps, diolah

Berdasarkan gambar 3 perkembangan tingkat Inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2025 menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika perekonomian daerah, guncangan harga komoditas global maupun domestik, kebijakan moneter, serta efektivitas pengendalian pasar oleh pemerintah daerah.

Pada awal periode pengamatan, yaitu tahun 2001, tingkat inflasi di Sumatera Utara tercatat cukup tinggi sebesar 14,79%, namun berhasil ditekan secara bertahap hingga mencapai 4,23% pada tahun 2003. Lonjakan inflasi yang sangat drastis dan ekstrem terjadi pada tahun 2005, di mana angka inflasi melonjak hingga mencapai 22,41%, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang periode penelitian. Lonjakan hiperinflasi ini utamanya dipicu oleh kebijakan nasional pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada meroketnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok secara masif di tingkat daerah. Setelah guncangan tersebut, inflasi kembali turun ke level 6,11% pada tahun 2006.

Pada tahun 2008, inflasi kembali merangkak naik ke angka 10,72% yang dipengaruhi oleh krisis keuangan global serta kenaikan harga pangan dunia (global food crisis). Namun, kondisi ini berhasil diredam pada tahun 2009 hingga mencapai level rendah sebesar 2,61%. Memasuki periode tahun 2010–2014, pergerakan inflasi di Sumatera Utara kembali berfluktuasi pada kisaran yang cukup tinggi, yaitu bergerak di antara angka 3,67% hingga

kembali menyentuh dua digit sebesar 10,18% pada tahun 2013, yang lagi-lagi disebabkan oleh penyesuaian harga komoditas energi domestik.

Satu hal yang menarik, periode tahun 2015–2025 menunjukkan tren inflasi yang relatif lebih stabil dan cenderung mengalami penurunan (disinflasi). Inflasi berhasil dijaga di bawah angka 7%, dengan titik terendah dicapai pada tahun 2021 sebesar 0,54%, yang merupakan nilai inflasi terendah sepanjang periode penelitian. Penurunan inflasi yang sangat tajam pada tahun 2020 (1,96%) dan 2021 (0,54%) ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas sosial akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sisi permintaan agregat dan daya beli masyarakat secara drastis. Pasca-pandemi, sempat terjadi kenaikan inflasi menjadi 6,12% pada tahun 2022 akibat pemulihan ekonomi dan penyesuaian harga pasca-krisis, sebelum akhirnya kembali stabil dan terkendali pada level rendah di tahun 2023 (2,25%), 2024 (2,12%), dan ditutup sebesar 1,54% pada tahun 2025.

Dalam makroekonomi, tingkat inflasi memiliki peran yang krusial sebagai indikator stabilitas makroekonomi suatu daerah. Inflasi yang rendah dan stabil sangat diharapkan karena memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sebaliknya, laju inflasi yang terlampaui tinggi serta tidak terkendali (seperti yang berlangsung pada tahun 2005) berpotensi mengurangi kemampuan daya beli riil masyarakat, menaikkan biaya permodalan, serta menimbulkan tingkat ketidakpastian yang besar dalam perekonomian. Dengan demikian, pengendalian inflasi menjadi salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi kondisi ekosistem perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Teori Ekspektasi Rasional (Rational Expectations Theory), pergerakan inflasi tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi riil jangka panjang selama laju perubahannya berada dalam batas yang dapat diprediksi oleh pelaku ekonomi. Ketika inflasi dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik, para pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian harga (price adjustment) tanpa harus menahan atau membatalkan komitmen bisnis mereka. Keberhasilan menjaga inflasi di level rendah pada dekade terakhir di Sumatera Utara tidak terlepas dari peran aktif koordinasi kebijakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Fluktuasi inflasi di Sumatera Utara ini secara tidak langsung berinteraksi dengan variabel makroekonomi lainnya dalam memengaruhi minat investasi. Meskipun inflasi mengalami pasang surut yang tajam terutama pada periode awal pengamatan kondisi inflasi yang cenderung melandai dan terkendali dengan baik pada periode 2015–2025 memberikan sinyal positif bagi iklim usaha. Hubungan empiris mengenai bagaimana fluktuasi tingkat inflasi ini berinteraksi bersama variabel Upah Minimum Regional (UMR) dalam memengaruhi volume Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara.

Berlandaskan dasar pemikiran yang sudah dipaparkan serta sejumlah kajian sebelumnya, kajian tersebut hendak berupaya mengkaji sejauh mana dampak banyaknya unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penanaman modal atas penampungan angkatan kerja pada wilayah Indonesia. Sehingga untuk itu penulis mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul : “Pengaruh Upah Minimum Regional (Umr) Dan Inflasi Terhadap Investasi (Pmdn) Di Sumatera Utara Pada Tahun 2001 – 2025”

METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Kajian tersebut menerapkan metode berbasis angka. Strategi numerik dalam pelaksanaannya semakin mengutamakan keberadaan faktor sebagai sebuah sasaran riset dan unsur tersebut wajib dirumuskan melalui wujud terukur dari setiap komponen yang diterapkan. Maksudnya supaya studi memakai metode numerik yaitu memverifikasi konsep,

menyusun bukti serta memperlihatkan keterkaitan dan dampak maupun komparasi antar faktor, menyajikan gambaran data statistik, menginterpretasikan serta memprediksi temuannya.

2. Jenis Penelitian

Kategori kajian tersebut bercorak pemaparan pengkajian dikarenakan studi tersebut menyajikan uraian mengenai dampak gaji batas bawah wilayah dan peningkatan harga umum kepada penanaman modal (PMDN) pada Provinsi Sumatera Utara. Pada riset tersebut, tipe informasi yang dimanfaatkan yakni berbentuk keterangan pendukung yang diperoleh melalui lembaga sentral perhitungan statistik (BPS).

Sumber Data

Informasi yang dimanfaatkan pada kajian tersebut merupakan keterangan pendukung berbentuk runtun waktu gaji batas bawah wilayah serta peningkatan harga umum selaku faktor bebas dan penanaman modal (PMDN) pada Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur terikat yang bersumber melalui lembaga sentral data angka (BPS). Informasi deret waktu umumnya dihimpun pada rentang masa secara berkesinambungan, contohnya catatan setiap pekan, keterangan per bulan ataupun informasi setiap tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis Dan Administrasi Indonesia

Indonesia merupakan hamparan geografis yang membentang luas layaknya permata maritim di garis khatulistiwa, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang tersebar dari barat hingga timur. Secara astronomis, Indonesia berada pada posisi strategis antara 6° Lintang Utara hingga 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur hingga 141° Bujur Timur, sebuah letak yang menempatkannya sebagai jembatan peradaban yang menghubungkan dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, serta menjadi pertemuan arus kehidupan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran penting sebagai poros maritim dunia yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan potensi ekonomi yang beragam.

Sebagai sebuah negara yang dilukiskan oleh ribuan gugusan pulau, Indonesia memiliki batas wilayah yang menjadi pagar alami bagi kedaulatannya. Pada bagian utara, wilayah Indonesia berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik yang menjadi gerbang interaksi kawasan Asia. Pada sisi selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia yang membentuk jalur strategis perdagangan serta hubungan antarnegara. Sementara itu, bagian timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik, sedangkan wilayah barat lautnya berbatasan dengan Laut Jawa yang menjadi salah satu jalur penting aktivitas ekonomi nasional.

Dengan luas wilayah yang mencapai 1.910.931,32 km², Indonesia ibarat kanvas geografis yang dihiasi oleh 17.504 pulau, yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi tersendiri. Keberagaman wilayah tersebut terbagi ke dalam tiga zona waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT), sebagai bentuk penyesuaian terhadap bentangan wilayah yang luas. Secara administratif, Indonesia tersusun atas 81.616 desa, 7.288 kecamatan, 416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi yang tersebar di lima pulau besar serta beberapa gugusan kepulauan, membentuk suatu sistem pemerintahan yang menjadi fondasi dalam mengelola keberagaman bangsa.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia memiliki arsitektur geografis yang unik, di mana lautan bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi penghubung yang menyatukan ribuan pulau dalam satu kesatuan bangsa. Predikat sebagai negara kepulauan

menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan wilayah yang menjadi sumber daya strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan dokumen Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.892.410,09 km² dengan jumlah pulau mencapai 17.001 pulau, yang tersebar dalam bentangan wilayah maritim yang luas.

Gambar. 1 Peta Indonesia



Sumber : www.google.com

Secara struktur geografis, Indonesia memiliki lima pulau utama yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang menjadi tiang penyangga utama kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki empat kawasan kepulauan besar, yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil), dan Kepulauan Maluku. Keberadaan berbagai pulau dan kepulauan tersebut menjadikan Indonesia sebagai mozaik geografis yang menyimpan beragam potensi, mulai dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati, hingga kekayaan budaya yang menjadi modal utama dalam perjalanan pembangunan bangsa.

Kondisi Demografi Indonesia

Berdasarkan temuan sensus penduduk yang diselenggarakan pada tahun 2020, lebih dari 270,02 juta penduduk berdomisili di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan pelaksanaan sensus penduduk tahun 2010 yang mencatat sebesar 237,64 juta penduduk. Melalui struktur kependudukan tersebut, populasi Indonesia diprediksi akan terus menunjukkan pertumbuhan hingga menyentuh 305 juta penduduk pada tahun 2035. Dengan persentase sekitar 56% populasi masyarakat diperkirakan akan menetap di Pulau Jawa, yaitu kawasan yang menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

Serta Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah berdaulat yang memiliki jumlah populasi terbesar keempat di dunia. Proyeksi BPS dari tahun 2010 hingga 2025 memperkirakan presentase jumlah penduduk menurut kelompok umur sebagai berikut: 0-14 tahun sebesar 2,7%, usia 15-59 Tahun sebesar 18,9% dan usia 60 tahun ke atas sebesar 86,8%. Ada variasi dalam pertumbuhan populasi menurut kelompok umur 0-14 tahun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,6% dan kelompok umur 15-59 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 18,9%.

Perkembangan Variabel Penelitian

Perkembangan Investasi (Pmdn) Di Sumatera Utara

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wilayah mencakup pemahaman mengenai penyertaan dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi pada kawasan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh investor nasional dengan memanfaatkan sumber daya finansial domestik. Selain menjadi penggerak roda ekonomi daerah, investasi PMDN yang kuat sangat krusial dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan produktivitas daerah, dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Data variabel Investasi PMDN di Sumatera Utara dapat dilihat dari Grafik 4.2 berikut:

Gambar 2 Perkembangan Investasi (PMDN) di Sumatera Utara pada tahun 2001 – 2025



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 2, perkembangan Investasi PMDN di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dengan gelombang kenaikan dan penurunan yang tajam sepanjang periode tahun 2001 hingga 2025. Berbeda dengan sektor riil lainnya yang cenderung stabil, variabel investasi di tingkat regional ini sangat sensitif terhadap perubahan regulasi daerah, stabilitas politik dan keamanan wilayah, serta kondisi makroekonomi baik di tingkat nasional maupun global.

Investasi PMDN di Sumatera Utara mencapai titik tertingginya (puncak) pada tahun 2018, yaitu sebesar 837.180,00 miliar. Lonjakan masif ini didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Utara secara masif, kemudahan perizinan berusaha di tingkat daerah melalui reformasi birokrasi, serta tingginya kepercayaan investor domestik terhadap potensi komoditas unggulan dan stabilitas ekonomi teritorial pada masa tersebut.

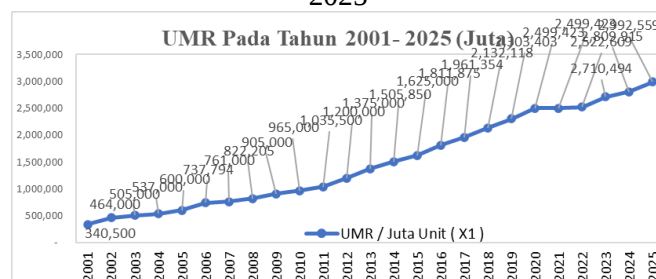
Sebaliknya, setelah mencapai puncak di tahun 2018, tren PMDN di Sumatera Utara cenderung menurun dan mengalami penurunan paling drastis hingga mencapai titik terendahnya pada akhir periode pengamatan, yaitu tahun 2023 sebesar 21.574,00 miliar, tahun 2024 sebesar 22.789,20 miliar, dan tahun 2025 sebesar 22.445,70 miliar. Penurunan tajam yang dimulai sejak pasca-2018 dan berlanjut hingga tahun 2025 ini secara umum dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada pasar ekspor daerah, peralihan instrumen investasi, serta pengetatan likuiditas di pasar domestik yang membuat pelaku usaha lokal di Sumatera Utara cenderung bersikap wait and see atau mengalihkan modalnya ke sektor yang dianggap lebih aman.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Investasi PMDN merupakan indikator penggerak (leading indicator) yang sangat krusial dalam menilai iklim bisnis dan kesehatan ekonomi suatu daerah. Fluktuasi yang tajam mengindikasikan bahwa kepastian hukum, stabilitas politik lokal, dan insentif fiskal dari pemerintah daerah memegang peranan jangka panjang yang sangat vital. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memicu pasang surutnya Investasi PMDN menjadi hal yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan kebijakan stimulasi ekonomi demi menjaga daya saing pasar dan kemudahan berusaha di masa depan.

Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) Di Sumatera Utara

Imbalan kerja batas bawah kawasan mencakup definisi sebuah patokan terendah yang diterapkan oleh seluruh pemilik bisnis maupun pihak sektor ekonomi guna menyediakan kompensasi terhadap karyawan pada ruang aktivitas perusahaan ataupun profesi di area ketentuan administratif Provinsi Sumatera Utara. Selain berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi bagi pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja, kebijakan UMR yang tepat sangat krusial dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat local, menekan angka kemiskinan, serta memelihara keseimbangan iklim industrial yang kondusif di daerah. Data variabel UMR di Sumatera Utara dapat dilihat dari Grafik 4.4 berikut:

Gambar 3 Perkembangan Upah Minimum Regional (UMR) di Sumatera Utara pada tahun 2001 – 2025



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 3, perkembangan UMR di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun sepanjang periode pengamatan 2001 hingga 2025. Berbeda dengan variabel investasi yang fluktuatif dan penuh ketidakpastian, variabel upah minimum ini bergerak secara monoton naik (trend positif) yang mencerminkan respons berkala terhadap penyesuaian laju inflasi daerah serta pertumbuhan ekonomi regional.

Nilai UMR di Sumatera Utara berada pada titik terendahnya pada awal periode pengamatan, yaitu tahun 2001 dengan nilai sebesar 340.500 rupiah. Rendahnya nominal upah pada masa tersebut merepresentasikan kondisi pemulihan ekonomi makro pasca-krisis serta formula penetapan upah masa lalu yang belum sepenuhnya mengintegrasikan komponen hidup layak secara komprehensif.

Seiring berjalannya waktu, penguatan regulasi ketenagakerjaan dan pertumbuhan PDRB daerah mendorong kenaikan upah yang stabil hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan nilai 2.992.559 rupiah. Menariknya, grafik menunjukkan adanya fase landai (stagnan) pada periode tahun 2020 hingga 2022, di mana UMR tertahan di angka 2.499.423 rupiah. Fenomena pembekuan atau penahanan laju kenaikan upah pada periode tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan relaksasi ekonomi akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah daerah berupaya menjaga agar tidak terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Sumatera Utara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa UMR di Sumatera Utara merupakan indikator fundamental dalam menilai kesejahteraan tenaga kerja dan daya saing pasar kerja daerah. Kenaikan yang terus berlanjut pasca-pandemi (tahun 2023–2025) mengindikasikan pulihnya aktivitas produksi dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, memahami dinamika perkembangan UMR menjadi sangat vital bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan jangka panjang demi menjamin pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

Perkembangan Inflansi Di Sumatera Utara

Kenaikan harga wilayah mencakup definisi yaitu sebuah rangkaian bertambahnya nilai produk serta layanan dengan kondisi menyeluruh dan berkesinambungan pada ruang perdagangan domestik Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu tertentu. Selain menjadi tolok ukur kestabilan ekonomi makro daerah, tingkat inflasi yang terkendali sangat krusial dalam menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat, melindungi nilai riil pendapatan pekerja (seperti nilai UMR), serta memberikan kepastian iklim usaha untuk berbagai penanam modal yang bermaksud menginvestasikan dananya pada kawasan. Data variabel Inflasi di Sumatera Utara dapat dilihat dari Grafik 4.5 berikut:

Gambar 4 Perkembangan Inflasi di Sumatera Utara pada tahun 2001 – 2025



Sumber : Bps, diolah

Berdasarkan Gambar 4, perkembangan Inflasi di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dengan beberapa lonjakan tajam di masa lalu, namun bergerak ke arah tren yang semakin stabil dan rendah dalam satu dekade terakhir. Sifat variabel ini sangat dinamis karena merepresentasikan respons spontan perekonomian daerah terhadap kebijakan moneter nasional, guncangan pasokan komoditas pangan lokal, maupun perubahan harga barang yang diatur pemerintah (administered prices).

Tingkat inflasi di Sumatera Utara mencapai titik tertingginya (puncak) pada tahun 2005, yaitu sebesar 22,41%. Lonjakan inflasi yang sangat tinggi (hiperinflasi regional) pada masa tersebut dipicu oleh kebijakan nasional terkait pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara drastis, yang seketika mengerek biaya logistik serta harga kebutuhan pokok di pasar Sumatera Utara. Lonjakan signifikan lainnya juga sempat terjadi pada tahun 2001 (14,79%), tahun 2008 (10,72%) akibat krisis finansial global, dan tahun 2013 (10,18%) akibat penyesuaian harga energi.

Sebaliknya, tingkat inflasi di Sumatera Utara mencapai titik terendahnya sepanjang periode pengamatan pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,54%. Rendahnya angka inflasi ini (dekelerasi) merupakan anomali ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya pembatasan aktivitas sosial dan penurunan drastis daya beli serta konsumsi rumah tangga masyarakat akibat hantaman pandemi COVID-19. Pasca-pandemi, inflasi sempat kembali meningkat ke angka 6,12% pada tahun 2022 akibat pemulihan aktivitas ekonomi dan kenaikan harga komoditas global, sebelum akhirnya kembali stabil di koridor rendah pada akhir periode pengamatan, yaitu tahun 2023 (2,25%), tahun 2024 (2,12%), dan tahun 2025 (1,54%).

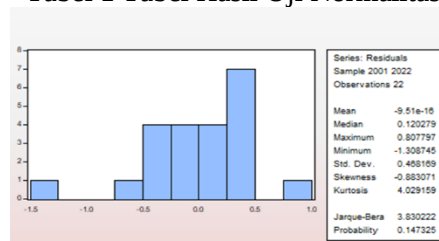
Fenomena ini menunjukkan bahwa Inflasi di Sumatera Utara merupakan indikator stabilitas makroekonomi regional yang sangat sensitif. Keberhasilan menekan inflasi hingga di bawah 2% pada periode 2023–2025 mencerminkan efektivitas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara dalam menjaga kelancaran pasokan pangan dan rantai distribusi logistik antarwilayah. Oleh karena itu, menjaga ritme inflasi yang rendah dan stabil menjadi agenda yang sangat vital bagi pemerintah daerah guna memastikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dapat dirasakan secara nyata tanpa tergerus oleh kenaikan harga.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Temuan kajian mengenai dugaan kenormalan menggunakan formula hubungan statistik dipaparkan pada daftar data sebagaimana tertera:

Tabel 1 Tabel Hasil Uji Normalitas



Sumber : Eviews 14, data diolah

Berlandaskan temuan pengujian kenormalan pada daftar data sebelumnya melalui penerapan metode Jarque-Bera diperoleh bahwa angka tingkat signifikansi peluang pada pemeriksaan tersebut memperlihatkan nilai sebesar $0,14 > 0,05 (\alpha)$. Nilai peluang dengan besaran 0,14 mengindikasikan bahwa data kajian memiliki penyebaran yang sesuai serta berada dalam kondisi distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 06/05/26 Time: 17:59
Sample: 2001 2025
Included observations: 22

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.811321	891.0044	NA
LOG(UMR)	0.047148	832.1763	1.547696
INFLASI	0.000713	4.276846	1.547696

Sumber : Output Eviews 14, data diolah

Hasil uji multikolinearitas diatas memberikan deksripsi berupa nilai VIF pada masing masing variabel independent bernilai 1.54, angka ini lebih rendah dari standar VIF yang terindikasi mengalami pelanggaran (yakni bernilai 10). Nilai VIF upah minimum regional, Inflasi dan Investasi (PMDN) < 10 . Maka pernyataan tersebut secara eksplisit menginformasikan bahwa seluruh data penelitian khususnya variabel independen tidak mengalami gangguan multikolinearitas data.

Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.788863	Prob. F(2,17)	0.4703
Obs*R-squared	1.868365	Prob. Chi-Square(2)	0.3929

Sumber : Output Eviews 14, data diolah

Hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukan nilai uji Breusch-Godfrey (DW) sebesar $0.39 < 0.05$ yang arti nya bahwa uji autokorelasi khususnya dikatakan sudah lolos dari masalah autokorelasi apabila angka sudah lebih besar dari pada angka 0.39.

Uji Heteroskedastisitas

Sedangkan temuan pemeriksaan ketidakseragaman penyebaran data dalam kajian tersebut yaitu:

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.953860	Prob. F(2,19)	0.4029
Obs*R-squared	2.007385	Prob. Chi-Square(2)	0.3665
Scaled explained SS	2.267694	Prob. Chi-Square(2)	0.3218

Sumber : Output Eviews 14, data diolah

Temuan pemeriksaan ketidaksamaan varians pada daftar data sebelumnya dapat diketahui bahwa angka tingkat signifikansi untuk banyaknya unit UMKM mencapai $0,32 > 0,05$, kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh faktor dalam kumpulan data kajian tidak mengalami permasalahan ketidakseragaman penyebaran data.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-19.95706	3.132303	-6.371370	0.0000
LOG(UMR)	2.008437	0.217137	9.249631	0.0000
INFLASI	-0.011105	0.026707	-0.415805	0.6822
R-squared	0.880325	Mean dependent var	7.944668	
Adjusted R-squared	0.867728	S.D. dependent var	1.353322	
S.E. of regression	0.492193	Akaike info criterion	1.546231	
Sum squared resid	4.602819	Schwarz criterion	1.695009	
Log likelihood	-14.00854	Hannan-Quinn criter.	1.581279	
F-statistic	69.98188	Durbin-Watson stat	2.193158	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Eviews 12, data diolah

Formulasi persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{LOGY} = -19.95706 + 2.008437 (\text{LOGUMR}) + -0.011105 (\text{INFLASI}) + e$$

Dimana :

UMR = Upah Minimum Regional di Sumatera Utara

INFLASI = Inflasi di Sumatera Utara

e = Error

Nilai-nilai parameter pada formula hubungan regresi linier berganda sebelumnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Berlandaskan model hubungan statistik memperlihatkan bahwasanya kompensasi batas bawah kawasan pada investasi domestik mempunyai angka statistik t 9,24 > 0,69 melalui tingkat peluang $0,00 < 0,05$, diperoleh simpulan bahwa hipotesis nol tidak diterima dan hipotesis alternatif dinyatakan berlaku, sehingga menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional memberikan dampak searah yang bermakna secara statistik terhadap pengalokasian dana nasional.
- Mengacu pada kalkulasi temuan pemeriksaan model statistik majemuk, peningkatan harga umum berkaitan dengan investasi domestik mempunyai angka statistik t sebesar -0,41 > 0,69 melalui tingkat peluang $0,68 < 0,05$, sehingga diperoleh keputusan bahwa hipotesis nol dinyatakan berlaku dan hipotesis alternatif tidak diterima, yang mengindikasikan bahwa inflasi memberikan dampak berlawanan arah serta tidak bermakna secara statistik terhadap pengalokasian dana nasional.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-19.95706	3.132303	-6.371370	0.0000
LOG(UMR)	2.008437	0.217137	9.249631	0.0000
INFLASI	-0.011105	0.026707	-0.415805	0.6822

Uji parsial merupakan instrumen analisis statistik yang berperan sebagai lensa pengamatan untuk menelusuri secara mendalam kekuatan pengaruh setiap variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat, dengan menjaga variabel lainnya tetap berada dalam kondisi konstan. Melalui pengujian ini, setiap variabel bebas diuji sebagai elemen yang memiliki potensi kontribusi terhadap perubahan variabel terikat dengan menggunakan tingkat batas kepercayaan signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Hasil estimasi berikut menggambarkan bagaimana peran Upah Minimum Regional dan Inflasi menjadi dua arus ekonomi yang diuji pengaruhnya terhadap Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel analisis, variabel Upah Minimum Regional (X1) menunjukkan jejak pengaruh yang kuat dalam memengaruhi variabel terikat. Hal tersebut terlihat dari nilai t-Statistic (t hitung) sebesar 9,249631 dengan tingkat probabilitas (Sig.) sebesar 0,0000. Ketika nilai probabilitas tersebut dibandingkan dengan batas signifikansi 0,05, terlihat bahwa nilai $0,0000 < 0,05$. Selain itu, kekuatan hubungan statistik juga tercermin melalui perbandingan nilai t hitung sebesar 9,249631 yang jauh melampaui nilai t tabel sebesar 2,074 pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 22.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa variabel Upah Minimum Regional (X1) menjadi salah satu fondasi ekonomi yang memiliki dorongan positif dan nyata secara statistik terhadap Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara. Dengan kata lain, peningkatan pada aspek Upah Minimum Regional mampu menjadi energi penggerak yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi domestik.

Sementara itu, variabel Inflasi (X2) memperlihatkan pola hubungan yang berbeda dalam perjalanan analisis statistik. Berdasarkan hasil perhitungan, variabel Inflasi memperoleh nilai t-Statistic (t hitung) sebesar -0,415805 dengan tingkat probabilitas (Sig.) sebesar 0,6822. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa $0,6822 > 0,05$, sehingga pengaruh yang diberikan belum mampu melewati batas signifikansi penelitian. Selain itu, nilai t hitung sebesar -0,415805 juga tidak menunjukkan kekuatan yang lebih besar dibandingkan nilai t tabel sebesar 2,074.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Inflasi belum menjadi gelombang ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun arah hubungan menunjukkan kecenderungan negatif, perubahan tingkat inflasi belum cukup kuat secara statistik untuk menjadi faktor utama yang menentukan pergerakan investasi domestik. Dengan demikian, Inflasi dapat dipandang sebagai faktor ekonomi yang memberikan tekanan terhadap iklim investasi, namun pengaruhnya belum memiliki daya dorong yang signifikan dalam periode penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.880325	Mean dependent var	7.944668
Adjusted R-squared	0.867728	S.D. dependent var	1.353322
S.E. of regression	0.492193	Akaike info criterion	1.546231
Sum squared resid	4.602819	Schwarz criterion	1.695009
Log likelihood	-14.00854	Hannan-Quinn criter.	1.581279
F-statistic	69.88188	Durbin-Watson stat	2.193158
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji F atau pengujian simultan merupakan instrumen analisis statistik yang berfungsi sebagai cakrawala pengamatan untuk melihat bagaimana dua kekuatan ekonomi, yaitu Upah Minimum Regional (UMR) dan Inflasi, bergerak secara bersama-sama dalam membentuk dinamika terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara. Pengujian ini menjadi jembatan analisis untuk memahami apakah variabel independen secara kolektif mampu memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi.

Berdasarkan hasil pengujian simultan, diperoleh nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,000000 yang berada di bawah batas tingkat signifikansi 0,05. Angka tersebut menjadi sinyal statistik bahwa hubungan antara variabel Upah Minimum Regional dan Inflasi secara bersama-sama memiliki kekuatan pengaruh yang signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (Investasi) di Sumatera Utara. Dengan kata lain, kedua variabel tersebut bukan sekadar bergerak sebagai elemen ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan menjadi dua arus yang secara bersamaan membentuk arah perkembangan investasi domestik. Kekuatan hubungan tersebut semakin terlihat melalui nilai F Hitung sebesar 69,88188 yang jauh melampaui nilai F Tabel sebagai batas pembanding kritis, yaitu sekitar 0,71. Perbandingan tersebut menggambarkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan keterkaitan antara Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri. Berdasarkan dua landasan pengujian, yaitu perbandingan nilai probabilitas (p-value) serta perbandingan antara F Hitung dan F Tabel, dapat dirumuskan keputusan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) dan Inflasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dalam penelitian ini dapat diibaratkan sebagai peta analisis yang mampu menggambarkan perjalanan faktor ekonomi dalam memengaruhi arus investasi. UMR dan Inflasi menjadi dua komponen utama yang secara bersama-sama memberikan warna terhadap perkembangan iklim investasi domestik, sehingga model penelitian yang digunakan dinyatakan layak untuk menggambarkan fenomena ekonomi yang dikaji.

Uji Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk melihat bagaimana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil uji R² Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara 2001-2025.

Hasil Estimasi

$$\text{LOG (PMDN)} = -19.95706 + 2.008437 \text{ LOG(UMR)} + -0.011105 \text{ INFLASI}$$

Interpretasi

1. Nilai koefisien sebesar -19.95706 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas dianggap konstan dan perubahan pada PMDN menjadi sebesar 19.97%.
2. Terdapat koefisien UMR sebesar 2.008437 yang dapat diartikan bahwa variabel apabila UMR naik sebesar 1% maka PMDN menjadi sebesar 2%. koefisien UMR bernilai positif yang artinya bahwa apabila UMR meningkat maka PMDN akan ikut meningkat.
3. Terdapat koefisien Inflasi sebesar - 0.011105 yang dapat diartikan bahwa variabel apabila Inflasi naik sebesar 1% maka PMDN akan menurun sebesar - 0.01%. koefisien Inflasi bernilai negatif yang artinya bahwa apabila Inflasi meningkat maka PMDN akan menurun.

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0.8803 atau 88,03%. Dengan demikian persentase pengaruh variabel Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara 2001-2025 yaitu sebesar 88.03%. yang artinya sebesar 11,97 pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian Variabel lain yang menyumbang 11,97% ini bisa berupa:

1. Kondisi Infrastruktur dan Biaya Logistik: Ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai, seperti optimalisasi Pelabuhan Belawan, jalan Tol Trans-Sumatera, dan keandalan pasokan energi daerah, berkorelasi langsung dengan efisiensi biaya logistik. Infrastruktur yang terintegrasi menjadi daya tarik utama bagi PMDN karena dapat menekan biaya operasional secara signifikan
2. Birokrasi dan Kepastian Institusional: Kemudahan dan kecepatan proses perizinan usaha (seperti implementasi perizinan terpadu) serta kepastian hukum di tingkat pemerintah daerah sangat menentukan realisasi investasi. Birokrasi yang transparan akan meminimalkan hidden cost dan meningkatkan kepercayaan investor domestik.
3. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Produktivitas SDM: Sumatera Utara memiliki keunggulan komparatif struktural di sektor perkebunan (khususnya kelapa sawit dan karet). Fluktuasi harga komoditas ini akan memengaruhi arus PMDN. Di sisi ketenagakerjaan, investor tidak hanya berpatokan pada besaran UMR, melainkan mempertimbangkan rasio upah terhadap produktivitas dan tingkat keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
4. Stabilitas Sosial, Politik, dan Keamanan: Dinamika politik lokal, kepastian keamanan, serta harmonisasi hubungan industrial (seperti minimnya konflik antara buruh dan perusahaan) adalah prasyarat mutlak yang memberikan jaminan keamanan bagi aset dan kelangsungan operasional investasi jangka panjang

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Investasi (Pmdn)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Regional (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,0000 < 0,05$, koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya, peningkatan Upah Minimum Regional di Sumatera Utara berdampak pada peningkatan Investasi (PMDN) yang terserap, dan sebaliknya, penurunan Upah Minimum Regional akan berdampak pada berkurangnya Investasi (PMDN).

Hasil ini memperkuat Teori Ekonomi Makro Keynesian (Keynesian Macroeconomic Theory) dan Teori Upah Efisiensi (Efficiency Wage Theory), yang menyatakan bahwa upah pekerja bukanlah semata-mata biaya produksi yang membebani perusahaan, melainkan komponen utama pendorong daya beli masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Menurut John Maynard Keynes, peningkatan upah akan meningkatkan pendapatan siap belanjakan (disposable income) pekerja yang kemudian memicu lonjakan permintaan barang dan jasa secara agregat di pasar. Permintaan yang tinggi ini pada akhirnya akan merangsang para pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis dan menambah investasi Keynes (1936). Di sisi lain, Stiglitz (1984) melalui Teori Upah Efisiensi menegaskan bahwa upah yang lebih tinggi dari standar pasar akan memotivasi pekerja untuk lebih produktif dan menekan biaya pergantian karyawan (turnover cost). Ramadhan & Wijaya (2023) dalam studinya mengenai dinamika investasi domestik di pulau Sumatera menemukan bahwa kebijakan upah minimum yang terukur tidak menyurutkan minat investor PMDN, melainkan bertindak sebagai stimulan konsumsi rumah tangga yang memperbesar skala pasar (market size) bagi komoditas lokal. Selain itu Hidayat (2024) menegaskan bahwa daerah dengan tingkat upah yang kompetitif cenderung menarik investasi yang padat modal dan berbasis teknologi karena diimbangi oleh peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja setempat.

Sejalan dengan teori tersebut, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan beberapa penelitian terdahulu. Pratama & Arsyad (2020) menemukan bahwa peningkatan Upah Minimum Regional memiliki dampak positif terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) karena sebagian besar investor domestik berorientasi pada pencarian pasar lokal (market-seeking investment). Penelitian lain oleh Siregar & Nasution (2022) di wilayah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penetapan UMR yang layak berkorelasi positif dengan stabilitas iklim investasi, karena mampu menekan angka konflik industrial dan demonstrasi buruh. Penelitian Yuliana (2021) juga menegaskan bahwa kenaikan upah minimum sering kali dipandang oleh investor sebagai indikator kuatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya daya beli masyarakat di suatu daerah.

Adapun alasan logis dari hubungan positif ini adalah karena banyak proyek PMDN di Sumatera Utara yang pangsa pasarnya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik (seperti sektor perdagangan, industri makanan/minuman, perumahan, dan jasa). Ketika UMR di Sumatera Utara meningkat, daya beli masyarakat pekerja ikut menguat secara drastis. Pasar dengan kemampuan konsumsi yang besar ini menjadi magnet utama bagi para investor domestik untuk menanamkan modalnya. Selain itu, dari sisi operasional, pemberian UMR yang layak terbukti meningkatkan loyalitas dan etos kerja SDM. Hal ini menciptakan lingkungan industri yang harmonis dan efisien, yang pada akhirnya memberikan rasa aman bagi penanam modal.

Lebih jauh lagi, dalam konteks perekonomian saat ini, pemerintah Indonesia dan daerah telah mengimbangi kebijakan pengupahan dengan berbagai fasilitas kemudahan berusaha. Penerapan perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), perbaikan infrastruktur logistik di Sumatera Utara (seperti Tol Trans-Sumatera dan Pelabuhan Belawan), serta formula pengupahan yang lebih terukur memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Kondisi ini membuat para pemodal tidak lagi semata-mata mencari daerah dengan "upah buruh paling murah", melainkan mencari daerah dengan kepastian regulasi, infrastruktur memadai, dan daya beli masyarakat yang tinggi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara. Peningkatan UMR terbukti bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi stimulus yang efektif dalam mendorong daya beli lokal dan produktivitas kerja yang pada gilirannya menarik arus modal masuk. Efektivitas pengaruh ini tercermin dari nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang jauh lebih kecil dari 0,05 serta koefisien regresi yang positif, yang

mengindikasikan bahwa kesejahteraan tenaga kerja berbanding lurus dengan pertumbuhan investasi domestik di Sumatera Utara.

Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi (PMDN)

Berdasarkan hasil perhitungan pada variabel inflasi menunjukkan bahwa variabel Inflasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,6822 > 0,05$. Koefisien regresi yang bertanda negatif $(-0,011105)$ menunjukkan bahwa Inflasi memiliki hubungan yang berlawanan arah namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Artinya, fluktuasi naik atau turunnya tingkat inflasi di Sumatera Utara selama periode 2001-2025 tidak memberikan dampak atau perubahan yang berarti bagi keputusan realisasi Investasi PMDN secara agregat. Hasil ini memperkuat Teori Ekspektasi Rasional (Rational Expectations Theory) yang dikembangkan oleh Robert Lucas, serta Teori Investasi dalam Ketidakpastian (Investment under Uncertainty). Teori ini menyatakan bahwa jika pergerakan inflasi masih berada dalam batas yang dapat diprediksi oleh pelaku ekonomi, maka inflasi tersebut tidak akan mengganggu keputusan investasi riil dalam jangka panjang Lucas (1976). Pelaku usaha domestik umumnya telah mengantisipasi laju inflasi tahunan ke dalam rencana bisnis mereka, sehingga perubahan inflasi yang moderat tidak serta-merta membatalkan atau menahan komitmen investasi modal yang telah direncanakan. Sejalan dengan teori tersebut, hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan beberapa penelitian terdahulu. Wulandari (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PMDN karena sifat investasi domestik cenderung lebih tahan terhadap guncangan harga domestik dibanding investasi asing (PMA). Penelitian lain oleh Nasution & Harahap (2021) di wilayah Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa inflasi bukan menjadi determinan utama PMDN, mengingat investor lokal lebih berfokus pada potensi pasar jangka panjang. Demikian pula dengan temuan Saputra (2022) yang menyatakan bahwa kestabilan ekonomi makro yang relatif terjaga membuat variabel inflasi kehilangan daya pengaruhnya secara statistik terhadap pergerakan investasi sektoral. Temuan Suryani (2024) dalam kajiannya mengenai investasi regional di pulau Sumatera menyimpulkan bahwa guncangan inflasi jangka pendek tidak memengaruhi keputusan PMDN, sebab investor penanam modal dalam negeri lebih sensitif terhadap variabel riil seperti ketersediaan infrastruktur dan kepastian hukum. Fahmi & Hidayat (2023) mengungkapkan bahwa inflasi yang berada pada level rendah dan terprediksi tidak secara agresif memengaruhi PMDN karena pengusaha domestik memiliki keunggulan asimetri informasi dan adaptasi pasar lokal yang lebih baik dibandingkan investor asing.

Adapun alasan logis dari hubungan negatif yang tidak signifikan ini adalah karena penanam modal dalam negeri (PMDN) di Sumatera Utara mayoritas bergerak di sektor-sektor riil yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian harga (price adjustment). Ketika terjadi kenaikan harga barang (inflasi), produsen domestik dapat mengompensasikannya dengan menaikkan harga jual produk ke konsumen guna menjaga margin keuntungan, sehingga minat investasi tidak menurun drastis. Selain itu, inflasi di Sumatera Utara selama periode 2001-2025 secara umum bersifat fluktuatif namun tetap berada dalam rentang yang terkendali, bukan merupakan hiperinflasi yang dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, tingkat inflasi tidak dipandang sebagai ancaman atau risiko sistemik utama bagi para investor domestik. Lebih jauh lagi, dalam konteks koordinasi kebijakan di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah berhasil menjaga stabilitas pasokan pangan dan kelancaran distribusi logistik. Keberadaan TPID yang aktif memantau harga komoditas strategis memberikan sinyal positif bagi dunia usaha bahwa risiko ketidakpastian harga dapat diredam. Hal ini membuat para pelaku PMDN lebih memprioritaskan faktor internal daerah seperti ketersediaan bahan baku perkebunan dan

pertumbuhan daya beli masyarakat akibat kenaikan UMR, ketimbang mencemaskan pergerakan inflasi tahunan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat Inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara. Naik turunnya inflasi di daerah tidak menjadi parameter utama yang menghambat atau mendorong laju penanaman modal dalam negeri. Sifat tidak signifikan ini secara empiris tercermin dari tingkat probabilitas sebesar 0,6822 yang jauh lebih besar dari alpha 0,05 serta nilai t-statistik yang kecil (-0,415805), yang mengindikasikan bahwa selama inflasi berada pada batas toleransi ekonomi, variabel ini tidak sensitif dalam memengaruhi volume investasi PMDN di Sumatera Utara.

Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Inflasi Secara Simultan Terhadap Investasi (PMDN)

Berdasarkan hasil uji F-statistik pada model regresi yang digunakan, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Upah Minimum Regional (X1) dan Inflasi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh simultan ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya, ketika kedua variabel ini dipertimbangkan secara bersama-sama, mereka secara signifikan mempengaruhi tingkat realisasi Investasi PMDN di Sumatera Utara selama periode pengamatan 2001-2025. Secara teori, hasil ini dapat dijelaskan dengan menggabungkan Teori Makroekonomi Keynesian (Keynesian Theory) dan Teori Investasi Neoklasik (Neoclassical Theory of Investment). Menurut Keynes (1936), peningkatan upah minimum regional dapat mendorong pendapatan siap belanja masyarakat yang kemudian memicu kenaikan permintaan agregat pasar. Pasar dengan daya beli yang kuat ini menjadi daya tarik utama bagi investasi berorientasi pasar (market-seeking investment). Di sisi lain, Teori Neoklasik yang dipopulerkan oleh Jorgenson (1963) menekankan pentingnya stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi, dalam menentukan biaya modal (user cost of capital) dan kepastian keuntungan di masa depan. Ketika faktor pendorong pasar (UMR) dan indikator risiko harga (Inflasi) digabungkan, keduanya berinteraksi membentuk indikator kelayakan iklim investasi yang komprehensif bagi para penanam modal domestik. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan pengupahan dan stabilitas harga mampu memperkuat arus penanaman modal di berbagai wilayah. Ramadhan & Lestari (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kombinasi antara variabel UMR dan stabilitas makroekonomi daerah memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap total realisasi investasi riil. Ginting & Situmorang (2022) juga menemukan bahwa meskipun inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PMDN di Sumatera Utara, ketika dikombinasikan dengan variabel UMR, hasilnya menjadi signifikan karena potensi keuntungan dari daya beli pasar yang didorong oleh upah layak mampu mengompensasi risiko inflasi. Penelitian oleh Lubis (2023) yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara juga menekankan pentingnya peran simultan antara regulasi upah minimum dan pengendalian inflasi daerah dalam menciptakan stabilitas makro yang menarik minat para pemodal domestik. Wibowo & Nugroho (2023) dalam analisis investasi regionalnya menyimpulkan bahwa pengujian secara bersama-sama (simultan) antara kebijakan pengupahan dan tingkat inflasi menghasilkan model prediktif yang jauh lebih kuat dalam menjelaskan volatilitas PMDN dibandingkan pengujian secara parsial. Temuan Siregar et al. (2024) menegaskan bahwa daya tarik investasi domestik di tingkat provinsi sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan daya beli buruh (UMR) dan kestabilan harga komoditas (inflasi) yang bergerak secara simultan menjaga kepastian margin keuntungan bisnis.

Dari sisi logis, hasil ini sangat masuk akal karena investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak pernah melihat satu indikator ekonomi secara terisolasi saat mengambil keputusan ekspansi atau investasi modal yang bernilai besar. Kenaikan UMR di satu sisi mencerminkan peningkatan daya beli konsumen lokal yang akan menyerap produk hasil investasi, sedangkan inflasi mencerminkan stabilitas biaya produksi jangka panjang. Sinergi antara pasar yang prospektif akibat UMR yang memadai, dipadukan dengan laju inflasi yang berada pada batas toleransi, memberikan kepastian hukum dan ekonomi yang aman. Kolaborasi antara pertumbuhan daya beli masyarakat dengan stabilitas harga makroekonomi menjadi kunci utama dalam mendorong ekosistem investasi PMDN yang berkelanjutan di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil uji F-statistik, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Upah Minimum Regional (UMR) dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara. Meskipun secara parsial variabel inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun dalam hubungan gabungan dengan UMR, pengaruh total keduanya menjadi sangat signifikan terhadap penyerapan investasi domestik. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan ekonomi yang terintegrasi di tingkat daerah, di mana kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui UMR harus berjalan selaras dengan pengawasan stabilitas harga oleh otoritas moneter daerah (seperti TPID) guna menjaga daya tarik investasi di Sumatera Utara. Meskipun secara parsial variabel inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun dalam hubungan gabungan dengan UMR, pengaruh total keduanya menjadi sangat signifikan terhadap penyerapan investasi domestik. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan ekonomi yang terintegrasi di tingkat daerah, di mana kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui UMR harus berjalan selaras dengan pengawasan stabilitas harga oleh otoritas moneter daerah guna menjaga daya tarik investasi di Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berlandaskan pengolahan informasi yang sudah dilaksanakan, sedangkan rangkuman temuan dalam kajian tersebut merupakan sebagai berikut:

1. Upah Minimum Regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara periode 2001-2025.
2. Inflasi berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara periode 2001-2025.
3. Upah Minimum Regional dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Investasi (PMDN) di Sumatera Utara periode 2001-2025.

Saran

Merujuk pada rangkuman temuan yang sudah diuraikan sebelumnya, dengan demikian penyusun mengemukakan rekomendasi yakni sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

- a. Memformulasikan Kebijakan UMR yang Adil dan Berbasis Produktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan terus menetapkan kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang terukur untuk menjaga daya beli dan pendapatan siap belanja (disposable income) masyarakat pekerja. Namun, agar tidak membebani dunia usaha, peningkatan UMR ini harus diimbangi dengan penguatan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan program sertifikasi keahlian. Dengan

- demikian, kenaikan upah akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas kerja, yang secara langsung akan menjadi magnet bagi para investor domestik (PMDN)
- b. Mengoptimalkan Peran TPID dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Logistik Walaupun capaian kajian memperlihatkan bahwa kenaikan harga umum belum memberikan dampak bermakna secara statistik melalui pengujian individual, pihak pemerintahan wilayah tetap wajib mempertahankan keseimbangan perekonomian secara luas dengan cara memaksimalkan fungsi kelompok Pengaturan Laju Inflasi Kawasan (TPID). Fokus utama harus diarahkan pada pengendalian harga komoditas pangan strategis dan kelancaran jalur distribusi logistik di Sumatera Utara. Stabilitas harga yang terjaga dengan baik akan memberikan kepastian kalkulasi biaya operasional (cost of production) jangka panjang, sehingga para penanam modal dalam negeri tidak ragu untuk merealisasikan investasinya.
 - c. Membangun Ekosistem Iklim Investasi Daerah yang Terintegrasi Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan pengupahan yang layak dan stabilitas harga dengan kemudahan berbisnis secara menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur penunjang (seperti optimalisasi Tol Trans-Sumatera dan akses kepelabuhanan), serta penyederhanaan birokrasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kolaborasi antara pasar yang prospektif (daya beli tinggi akibat UMR layak) dan kepastian regulasi kawasan dapat mewujudkan lingkungan penanaman modal yang mendukung untuk perkembangan investasi domestik yang berkesinambungan pada Provinsi Sumatera Utara.

Bagi Peneliti

- a. Menambahkan Variabel Kontrol Makroekonomi dan Institusional Lainnya akademisi berikutnya diharapkan mampu mengembangkan ruang lingkup kajian melalui penyertaan faktor-faktor pengendali tambahan di luar model ini untuk menjelaskan sisa variasi nilai determinasi sebesar 12%. Variabel ekonomi atau non-ekonomi tersebut dapat berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat suku bunga pinjaman, indeks kualitas infrastruktur daerah, atau tingkat kepatuhan hukum, agar dapat menggambarkan dinamika investasi secara lebih komprehensif.
- b. Menganalisis Arus Investasi Secara Spesifik Berdasarkan Sektor Usaha Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk membedakan atau memecah data investasi PMDN berdasarkan klaster sektor industrinya (seperti sektor primer perkebunan, sektor manufaktur, atau sektor jasa). Pemisahan ini penting dilakukan agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sektor mana saja di Sumatera Utara yang paling sensitif terhadap penyesuaian upah minimum (sektor padat karya) atau sektor yang paling rentan terhadap gejolak harga bahan baku (akibat inflasi).
- c. Mengombinasikan dengan Studi Kualitatif Terkait Persepsi Pelaku Usaha Melakukan penelitian lanjutan dengan metode campuran (mixed methods) atau pendekatan kualitatif untuk melihat dinamika riil di lapangan. Studi kualitatif ini dapat difokuskan pada wawancara mendalam mengenai persepsi para investor domestik, asosiasi pengusaha (seperti APINDO), serta pengambil kebijakan di Sumatera Utara terkait dampak nyata dari kenaikan upah minimum tahunan dan stabilitas harga, sehingga diperoleh data yang lebih kontekstual, komprehensif, dan aplikatif.

Bagi Akademisi

- a. Memperkaya Literatur dan Khazanah Teori Ekonomi Regional temuan studi tersebut diproyeksikan mampu berperan sebagai pelengkap sumber keilmuan serta memperluas kepustakaan akademis mengenai interaksi antara kebijakan pengupahan, stabilitas harga, dan perilaku investasi di tingkat daerah. Temuan mengenai pengaruh positif UMR serta ketidaksignifikanan variabel inflasi terhadap PMDN dapat menjadi bahan rujukan bagi kalangan akademisi untuk memperdalam kajian mengenai Efficiency Wage Theory (Teori Upah Efisiensi) dan relevansinya dalam konteks perekonomian wilayah berkembang seperti Provinsi Sumatera Utara.
- b. Menjadi Bahan Kajian dan Referensi Pembelajaran di Perguruan Tinggi Diharapkan hasil studi ini dapat dijadikan sebagai materi diskusi, studi kasus, atau bahan ajar dalam mata kuliah Ekonomi Regional, Kebijakan Publik, maupun Ekonomi Makro. Data empiris selama periode pengamatan ini memberikan gambaran riil kepada mahasiswa dan civitas akademika mengenai bagaimana variabel-variabel makroekonomi berinteraksi di dunia nyata, sehingga teori-teori ekonomi yang diajarkan di kelas dapat dipahami secara lebih kontekstual dan aplikatif.
- c. Mendorong Pengembangan Metodologi Penelitian Ekonometrika yang Lebih Dinamis Kalangan akademisi disarankan untuk menguji kembali model hubungan investasi ini dengan menggunakan pendekatan metodologi ekonometrika yang lebih mutakhir dan dinamis, seperti Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Vector Error Correction Model (VECM), atau analisis data panel spasial. Hal ini penting dilakukan guna memverifikasi sifat hubungan jangka panjang (kointegrasi) sekaligus membandingkan karakteristik elastisitas investasi antarprovinsi di Pulau Sumatera demi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S., & Joesoef, J. R. (2006). Dualisme dalam sektor manufaktur Indonesia: Sebuah uji hipotesis dengan analisis input-output. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 51-60. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/16509>
- Arafah, W., & Mustika, M. (2022). Analisis investasi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia: Studi empiris antar provinsi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 37(1), 89-101.
- Astutik, D. P., et al. (2013). Penyerapan tenaga kerja sektor informal (Studi kasus pedagang Pasar Tanjung Kabupaten Jember). *Jurnal Ekonomi Ketenagakerjaan*, 2(1), 45-55.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Tenaga Kerja. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2020). SMEs, growth, and poverty: Cross-country evidence. *Journal of Economic Growth*, 10(3), 199-229.
- Bonerri, K. B., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2020). Pengaruh pendidikan dan upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 34-45.
- Bustam, N. H. (2016). Pengaruh jumlah unit, PDB dan investasi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 2009-2013. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 250-261.
- Cans, L. R., & Wahyu, H. R. (2020). Analisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap nilai industri sektor industri manufaktur di Jawa Timur tahun 1999-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(3), 565-576.
- Fahmi, M., & Hidayat, R. (2023). Ekspektasi Rasional Investor Domestik dalam Merespon Fluktuasi Inflasi Sektoral. *Jurnal Riset Ekonomi Makro*, 14(2), 89-102.
- Febiani. (2024). Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Investasi, dan Tingkat Upah Minimum pada Sektor UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Skripsi tidak dipublikasikan).

- Fisher, I. (1911). *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises*. Macmillan.
- Fitriani, & Anwar. (2023). Pengaruh Inflasi terhadap Investasi Domestik di Indonesia Tahun 2000–2022. *Jurnal Ekonomi*.
- Fitriani, L., & Nugroho, R. (2020). Analisis simultan investasi dan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(3), 134–147.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (Cetakan V)*. Semarang: Penerbit BP-Universitas Diponegoro.
- Ginting, M., & Situmorang, R. (2022). Sinergitas variabel makroekonomi terhadap perkembangan investasi domestik di wilayah Sumatra. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Regional*, 14(1), 50-65.
- Harahap. (2023). Analisis Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Regional*.
- Harrod, R. F. (2022). An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, 49(193), 14–33.
- Hidayat, & Prasetyo. (2020). Pengaruh Tingkat Upah dan Stabilitas Harga terhadap Investasi Domestik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Hidayat, A. (2024). Analisis Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas dan Realisasi Investasi Domestik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 32(1), 45-58.
- Indartini, & Mutmainah. (2024). Analisis Statistik Parametrik dan Asumsi Klasik dalam Model Regresi. Penerbit Akademika.
- Jhingan, M. L. (2018). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Rajawali Pers, Penerjemah)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. *The American Economic Review*, 53(2), 247–259.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Palgrave Macmillan.
- Kurniawan, E. A. (2023). Pengaruh investasi dan upah serta ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(1), 46-58.
- Kurniawan. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
- Lubis, S. F. (2023). Analisis simultan pengaruh regulasi upah dan stabilitas harga terhadap investasi sektor riil di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 8(2), 112-126.
- Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1, 19-46.
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics (10th ed.)*. New York: Worth Publishers.
- Marino. (2021). Pengaruh jumlah unit, PDRB, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2009–2023. *Jurnal Kutubkhanah*, 16(2), 115–124.
- Mulyani. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Upah Minimum terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ekonomi*.
- Nasution, H., & Harahap, S. (2021). Analisis makroekonomi terhadap realisasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Statistik*, 5(2), 89-101.
- Nasution, S. (2017). Variabel penelitian. *Raudhah*, 05(02), 1–9. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>
- Nasution. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerbit Sinar Baru.
- Nasution. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi PMDN di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Pembangunan*.
- Nopirin. (2016). *Ekonomi Moneter (Buku 2, Edisi 4)*. BPFE Yogyakarta.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar statistik penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Nuryadi. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Prasetyo, A., & Wahyuni, S. (2021). Pengaruh pertumbuhan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 101–113.

- Pratama, R., & Arsyad, L. (2020). Pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penanaman modal dalam negeri di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45-58.
- Ramadhan, A., & Lestari, S. (2021). Determinan investasi PMDN di Indonesia: Analisis pengaruh upah minimum dan faktor makroekonomi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 19(3), 205-218.
- Ramadhan, F., & Wijaya, I. (2023). Determinasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Wilayah Sumatera: Pendekatan Analisis Data Panel. *Jurnal Ilmu Ekonomi Regional*, 15(3), 201-216.
- Ramadhani, & Siregar. (2022). Determinan Investasi PMDN di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional*.
- Rizal, M., & Amelia, F. (2020). Peran UMKM dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 55-64.
- Safina, L. (2011). Analisis Aktivitas Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Perencanaan Ekonomi*.
- Saleh, S. T., Adhitya, R., & Ramadhani, M. (2016). Analisis dampak produksi dan faktor-faktor eksternal terhadap ekspor pertanian Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 34(1), 13-26.
- Saputra, D. (2022). Pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap investasi sektor riil di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Makro*, 10(3), 142-155.
- Sari, & Putra. (2021). Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Investasi Dalam Negeri di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*.
- Sembiring, & Ginting. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi Domestik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*.
- Septi Nirmia Utamy. (2022). Pengaruh investasi UMKM dan piutang qardh terhadap modal kerja UMKM dalam Unit Usaha Syariah di Indonesia. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 207-217.
- Simanjuntak, P. J. (2016). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sipayung, L. Z. (2021). Pengaruh jumlah unit usaha, investasi, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2000-2019 (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Siregar, A. P., & Nasution, M. I. (2022). Analisis determinan investasi PMDN dan PMA di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112-125.
- Siregar, H., & Utami, S. (2024). Keseimbangan Upah Minimum dan Stabilitas Harga sebagai Sinyal Iklim Investasi Domestik. *Jurnal Analisis Ekonomi Kontemporer*, 22(1), 75-89.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Stiglitz, J. E. (1984). Theories of wage rigidity. *Macroeconomics and Finance*, 1(2), 164-192.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi (Miks). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2022). Makroekonomi Teori Pengantar (Edisi 3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2022). Pengantar teori makroekonomi (Edisi ke-3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryani, E. (2024). Determinasi Investasi Domestik: Studi Komparatif Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga di Wilayah Sumatra. *Ekonomi Kontemporer*, 26(1), 54-68.
- Susilo, E., & Handayani, D. (2021). Pengaruh UMKM dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(2), 101-113.
- Tamba, D. M., & Sihombing, R. (2023). Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 5(1), 70-81.
- Tambunan, T. (2012). Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting. Jakarta: LP3ES.
- Taqiyyuddin, F. (2023). Analisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui variabel Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(01), 95-105.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).
- Utomo, Y., & Sari, R. (2023). Dampak sinergi investasi dan UMKM terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 55–68.
- Wibowo, T., & Nugroho, A. (2023). Dinamika Uji Parsial dan Simultan pada Model Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia. *Performa: Jurnal Ekonomi Kuantitatif*, 11(3), 215-230.
- Wildan, W. (2018). Pengaruh investasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3), 200–206.
- Wulandari, T. (2019). Determinan investasi domestik di Indonesia: Pendekatan analisis jalur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 33-47.
- Wulandari. (2021). Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Investasi Dalam Negeri di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Ekonomi*.
- Yuliana, E., & Putri, R. (2020). Pengaruh investasi asing terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 120–133.
- Yuliana, S. (2021). Dampak kenaikan upah minimum regional terhadap daya beli masyarakat dan minat investasi sektor riil. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 201-215.
- Zahriyah. (2021). *Pengantar Teori Ekonometrika dan Analisis Regresi*. Penerbit Buku Ilmiah.
- Zenda, R. H., & Suparno. (2017). Peranan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya. *JEB: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 371–384